BAB II

DINAMIKA PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI INTERNASIONAL JEPANG DAN EKSISTENSI NEW CAPITALISM SEBAGAI PENDEKATAN EKONOMI BARU

Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, negara tersebut diduduki oleh Sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur, yang menjabat sebagai Komandan Tertinggi Sekutu (SCAP). SCAP bertujuan untuk demiliterisasi dan demokratisasi Jepang. Salah satu upaya tersebut melibatkan restrukturisasi ekonomi untuk mencegah Jepang menjadi kekuatan militer lagi.

Seperti yang dikaji oleh Hollerman (2011), SCAP memberlakukan kontrol ekonomi yang luas atas perdagangan dan keuangan untuk menstabilkan inflasi dan membatasi ekspor yang mendukung militerisme. Salah satu kebijakan kunci adalah pembubaran zaibatsu, yaitu konglomerat besar seperti Mitsubishi dan Sumitomo. Tujuannya adalah untuk memecah monopoli industri dan mendistribusikan kekayaan. Berikutnya, Studi oleh Wang (2022) mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan ini, yang meliputi industrialisasi terarah, kebijakan perdagangan baru, dan pengawasan keuangan, menjadi landasan bagi apa yang kemudian dikenal sebagai “keajaiban ekonomi Jepang” pada tahun-tahun berikutnya. Namun, Hollerman mencatat bahwa kontrol SCAP juga menghasilkan birokrasi ekonomi yang kuat, membuat Jepang lebih rentan terhadap proteksionisme pada era berikutnya. Selanjutnya, pemerintah Jepang menetapkan Kebijakan Produksi Prioritas yang mengarahkan sumber daya ke sektor batu bara, baja, dan transportasi untuk menstabilkan ekonomi (Okazaki, 2005). Selama pendudukan Sekutu, Jepang harus mengubah fokus ekonominya dari produksi militer ke industri sipil. Perubahan ini disebut konversi industri dan menjadi esensial bagi pertumbuhan ekonomi Jepang setelah perang.

2.1. Lanskap Ekonomi dan Geopolitik Jepang pada Era Kejayaan Jepang tahun 1960an

2.1.1. Lanskap Kejayaan Ekonomi Jepang (Hubungannya dengan kebijakan ekonomi politik)

Setelah Perang Dunia II, ekonomi Jepang mengalami perubahan yang mengesankan, yang dikenal sebagai "Keajaiban Asia." Periode ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pergeseran struktural yang signifikan. Faktor-faktor kunci meliputi rekonstruksi pasca perang, sistem keiretsu dan zaibatsu, peran Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI), serta hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat (Johnson, 1982; Yamamura, 1987). Setelah perang, Jepang menghadapi tantangan serius dalam membangun kembali ekonominya yang hancur. Serangan bom Sekutu menyebabkan negara ini kehilangan sebagian besar infrastrukturnya, dan sektor ekonomi serta pertanian mengalami penurunan tajam (Dower, 1999). Meskipun demikian, Jepang berhasil membangun kembali ekonominya. Dengan dukungan AS melalui Dodge Line, hal ini membantu menstabilkan ekonomi dan mengelola inflasi di Jepang (Mosk, 2001).

Perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh kebijakan reforma agraria pasca-perang. Petani kecil mendapatkan kesempatan untuk memiliki tanah mereka melalui program redistribusi yang diluncurkan oleh pemerintah dengan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan peningkatan produktivitas pertanian dan daya beli masyarakat yang lebih tinggi (Macnaughtan, 2005). Selain itu, sektor pertanian dan manufaktur berkembang pesat berkat kebijakan industrialisasi yang agresif (Patrick & Rosovsky, 1976).

Wilayah-wilayah ini menjadi landasan bagi perekonomian Jepang. Dari tahun 1950-an hingga 1970-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 10% per tahun. Investasi besar-besaran dalam pendidikan dan teknologi memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ini (Crawford, 1998). Untuk meningkatkan daya saing di sektor manufaktur, Jepang mengadopsi sistem manajemen kualitas yang ketat dan model produksi efisien seperti Just-In-Time, yang dikembangkan oleh Toyota (Womack et al., 1990).

Kebijakan pemerintah yang ramah bisnis dan fokus kuat pada ekspor juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Jepang secara strategis menargetkan industri ekspor seperti otomotif, elektronik, dan baja. Akibatnya, negara ini muncul sebagai pemimpin global di sektor-sektor tersebut (Katz, 1998). Dengan menerapkan kebijakan proteksionis, Jepang melindungi industri dalam negerinya dan memperluas akses ke pasar internasional, membangun ekonomi yang kuat dan kompetitif.

Elemen kedua adalah struktur korporasi Jepang yang unik dari keiretsu dan zaibatsu yang memfasilitasi industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi Jepang. Sebelum Perang Dunia II, zaibatsu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konglomerat keluarga besar yang mendominasi ekonomi Jepang. Setelah perang, zaibatsu dibongkar dan selama pendudukan, zaibatsu berubah menjadi keiretsu yang merupakan sekumpulan perusahaan yang saling terintegrasi yang diorganisir oleh hubungan bisnis dan kepemilikan saham (Morikawa, 1992). Anggota keiretsu, bersama dengan lembangan keuangan, mampu menciptakan sistem di mana mereka dapat berkolaborasi dengan efisien dalam produksi dan distribusi. Model ini juga memungkinkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk terus melakukan inovasi dan mengembangkan produk berkualitas tinggi yang memberikan persaingan di arena internasional. Selain itu, dengan dukungan bank-bank besar, keiretsu membantu mereka untuk beradaptasi dengan perubahan cepat di pasar global.

Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) adalah lembaga yang memiliki peran krusial bagi perencanaan dan pembangunan perekonomian Jepang sesudah perang. MITI berfungsi sebagai koordinasi antara swasta dan pemerintah, mendistribusikan arus investasi ke sektor-sektor yang dianggap strategis, serta menerapkan kebijakan proteksionis sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri (Johnson, 1982). Di samping itu, MITI memfasilitasi peredaran eskpor dan memanipulasi sistem pengawasan peredaran teknologi yang memungkinkan dalam negeri untuk mengakuisisi teknologi dari luar negeri dengan harga yang murah. MITI meyakinkan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mempercepat modernisasi industri, yang memungkinkan Jepang untuk membangun ketertinggalan dari negara-negara barat, melalui serangkaian kebijakan strategis yang dianut secara sistematis (Okimoto, 1989). Salah satu kontribusi MITI yang paling esensial, bisa dibilang, adalah inisiasi dan pelaksanaan kebijakan industri, yang berkontribusi pada pertumbuhan luar

biasa negara tersebut. Setelah kolonisasi Jepang dalam Perang Dunia Kedua, negara tersebut berada dalam dilema yang sulit; bagaimana membangun kembali kekuatan besar bangsa dalam imperialisme ekspansif yang tidak bersifat militer. Dalam konteks ini, Shigeru Yoshida, sebagai perdana menteri, merumuskan rencana strategi nasional yang disebut Doktrin Yoshida; yang menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri dan ekonomi Jepang selama beberapa dekade mendatang.

Tiga prinsip utama Doktrin Yoshida diuraikan oleh Pyle (1996). Yang pertama adalah bahwa Jepang akan mengandalkan perlindungan keamanan dari Amerika Serikat melalui Perjanjian Keamanan AS-Jepang (1951). Dengan mengalihkan tanggung jawab pertahanan eksternal kepada Amerika Serikat, Jepang dapat menghemat biaya pertahanan dan berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi domestik. Kedua, Jepang akan memberlakukan batasan pada peran militernya, hal ini sesuai dengan Pasal 9 konstitusi 1947 yang melarang penggunaan kekuatan bersenjata sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik internasional. Ketiga, Jepang akan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi negara, dengan fokus pada industrialisasi, ekspor, dan peningkatan kesejahteraan warganya. Hughes (2007) berpendapat bahwa doktrin Yoshida bukan sekadar kebijakan luar negeri, tetapi strategi besar untuk menghadapi tekanan domestik dan geopolitik. Dengan menghindari remiliterisasi, Jepang memperoleh legitimasi internasional pasca-perang dan dapat fokus pada modernisasi ekonomi melalui kolaborasi antara negara, birokrasi, dan sektor swasta, embrio dari negara berkembang Jepang. Di sisi lain, Green (2001) berpendapat bahwa doktrin Yoshida menyediakan apa yang dia sebut sebagai “ekonomi bersenjata strategis” bagi Jepang. Dengan ketergantungan keamanan pada Amerika Serikat, Jepang mampu memperkuat kekuatan ekonominya secara global tanpa militer, yang mengarah pada apa yang disebut sebagai “keajaiban ekonomi Jepang” pada tahun 1960-an hingga 1980-an.

Doktrin Yoshida adalah kebijakan luar negeri dan juga menjadi kebijakan yang menggerakan transformasi ekonomi Jepang pasca perang. Doktrin ini mulai memindahkan Jepang dari militerisasi ke dalam ekonomi pembangunan yang sistematis dan terkoordinasi. Jepang dapat memusatkan diri pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri karena dukungan proteksi yang diperoleh dari Amerika Serikat sehingga Jepang memiliki kebebasan fiskal dan kebebasan politik. Selain itu, karena keputusan Shigeru

Yoshida untuk mengurangi peran militer, Jepang dapat mengarahkan anggaran nasional secara signifikan ke sektor pembangunan infrastruktur dan industri. Merupakan sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Program ekonomi yang menjadi prioritas dan diyakini membantu Yoshida dan *Dodge Line aid*. Program ekonomi Amerika Serikat menjadi pendorong perkembangan ekonomi Jepang.

Selanjutnya, Samuels (2007) menguraikan bahwa pada saat Jepang tidak lagi memiliki beban pengeluaran untuk pertahanan, negara tersebut menguatkan peran birokrasi ekonomi seperti MITI dan Biro Perencanaan Ekonomi, yang mengarahkan kebijakan industri dan ekspor. Lembaga-lembaga tersebut menggerakkan pembiayaan untuk sektor-sektor yang dianggap prioritas seperti baja, otomotif, dan elektronik — yang menjadi inti dari apa yang disebut sebagai *developmental state*. Selain itu, Johnson (1982) menilai bahwa Doktrin Yoshida adalah fondasi institusional untuk apa yang disebut sebagai "keajaiban ekonomi" Jepang pada dekade 60–80-an. Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang didorong dari kerjasama negara, bank, dan industri besar, Jepang mampu membangun infrastruktur yang modern dan memperluas kapasitas ekspor.

Sejak periode pertumbuhan pesat ekonomi Jepang tahun 1950-1970, kebijakan ekonomi nasional mengarah kepada satu pola yang disebut dengan model ekonomi terkelola. Untuk model ini, negara melaksanakan intervensi, dengan koordinasi birokrasi, dan kolaborasi yang erat antara dua sektor, yaitu publik dan swasta. Selain itu, untuk industri yang strategis, yaitu: baja, otomotif, dan elektronik, pemerintah Jepang MITI juga menerapkan selektif proteksionisme. Proteksi juga dilakukan dengan pembatasan oleh kebijakan subsidi ekspor, pembatasan impor, dan proteksi tarif berdasarkan tahap pembangunan industri. Proteksi bukanlah untuk menghindari industri bersaing dengan negara lain, melainkan untuk menguatkan industri domestik terlebih dahulu sebelum memasuki pasar internasional. Sementara itu, pasca perang, struktur keiretsu — jaringan konglomerasi — yang berasal dari restrukturisasi zaibatsu, menjadi tulang punggung ekonomi Jepang. Menurut Gerlach (1992), keiretsu memfasilitasi kerjasama antara korporasi melalui kepemilikan silang, jaringan pasokan, dan bank utama yang membiayai. Sistem ini menciptakan stabilitas modal, teknologi baru, dan loyalitas kepada bisnis yang bersaing dalam jangka panjang, sekalipun loyalitas itu disertai dengan pengurangan persaingan yang bersifat internal.

Dalam hal kebijakan moneter, Murphy (1987) menekankan peran BoJ sebagai pelaksana kebijakan nilai tukar tetap dan suku bunga rendah untuk mendorong ekspor dan investasi di sektor industri. Sistem panduan jendela digunakan untuk mengarahkan kredit bank ke sektor-sektor yang diprioritaskan. Selain itu, bank-bank besar memainkan peran penting dalam membiayai ekspansi industri besar dengan dukungan kebijakan pemerintah.

Doktrin Yoshida pada umumnya menjadi tonggak stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia II, tapi banyak akademisi luar melihat ada harga yang harus dibayar. Strategi ini bikin Jepang bergantung secara struktural, baik soal keamanan maupun ekonomi. Masalah utamanya sebenarnya cukup sederhana: Jepang terlalu bergantung pada payung keamanan AS. Dengan menyerahkan urusan pertahanan ke AS, Jepang bisa mengalihkan dana besar-besaran buat membangun ekonomi. Namun akibatnya, otonomi strategis mereka jadi terbatas. Pyle (1996) menyebut ini sebagai “paradoks kekuatan Jepang”, negara yang kaya secara ekonomi, tapi tetap lemah dalam pengaruh politik dan militer dunia. Hughes (2007) juga mengkritik hal yang sama. Ia menyoroti bagaimana ketergantungan keamanan pada AS bikin Jepang kesulitan menjalankan kebijakan luar negeri yang benar-benar mandiri. Begitu peta kekuatan regional bergeser—Tiongkok makin kuat, AS perlahan mundur—Jepang sering terjebak dalam posisi bertahan dalam mengambil langkah geopolitik mereka. Dalam bidang ekonomi, Katz (1998) berpendapat, sistem ekonomi hasil era Yoshida—penuh kontrol negara dan jaringan keiretsu—justru melahirkan ekonomi yang tertutup dan susah beradaptasi dengan arus globalisasi. Proteksionisme industri, koordinasi birokrasi, dan intervensi negara yang dulu jadi kunci pembangunan, malah berubah jadi penghalang inovasi dan pembaharuan di era 1980-1990-an. Di sisi lain, Hatch dan Yamamura (1996), menyoroti bagaimana ekonomi Jepang sangat bergantung pada konsensus internal dan hubungan informal antara pemerintah dan bisnis. Dampaknya jelas—Jepang lambat bereaksi terhadap gelombang liberalisasi global dan reformasi pasar yang lebih fleksibel, sementara AS dan Eropa bergerak lebih cepat

Hubungan ekonomi Jepang dan Amerika Serikat ikut mendorong kebangkitan ekonomi Jepang. Perjanjian Keamanan AS-Jepang, misalnya, membuat Jepang bisa memangkas pengeluaran untuk pertahanan dan mengalihkan lebih banyak dana ke pembangunan ekonomi (Samuels, 2007). Tak hanya itu, Jepang juga mendapat akses ke pasar AS, sehingga produk-produk manufakturnya dapat menembus pasar internasional dan industri dalam negerinya berkembang pesat.

Investasi dan bantuan teknologi dari AS dapat mendorong modernisasi industri Jepang. Banyak perusahaan di Jepang langsung mengadopsi manajemen dan teknologi ala AS, tujuannya jelas: agar produksi jadi lebih efisien dan daya saing di pasar global makin kuat. Jepang tumbuh jadi kekuatan industri besar, bahkan salah satu ekonomi terbesar dunia, sebagian besar berkat dukungan AS. Namun, dampaknya tidak berhenti di situ. Perubahan ekonomi ini membawa pengaruh sosial yang besar. Standar hidup masyarakat Jepang naik, pendapatan negara ikut melesat. Tingkat pendidikan yang tinggi dan investasi besar di riset dan teknologi menghasilkan SDM yang inovatif dan berbakat. Ekonomi Jepang juga punya ciri khas yang menonjol: budaya kerja keras dan loyalitas pada perusahaan. Faktor ini ikut menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi mereka. Tentu saja, kisah sukses Jepang tidak serta begitu saja tanpa adanya tantangan. Jepang menghadapi krisis keuangan berat di dekade 1990-an akibat gelembung ekonomi yang pecah. Peristiwa ini memicu resesi panjang yang kemudian dikenal sebagai “Dekade yang Hilang” (Hoshi & Kashyap, 2004), terutama karena spekulasi berlebihan di pasar saham dan properti. Krisis ini mengingatkan betapa bahayanya pertumbuhan ekonomi yang melaju tanpa kontrol. Pertumbuhan ekonomi Jepang sering dibandingkan dengan Korea Selatan dan Tiongkok. Korea Selatan, misalnya, sukses berkat kebijakan industrialisasi yang kuat dan hubungan erat dengan AS. Namun, struktur chaebol di Korea Selatan jauh lebih terkonsentrasi dibanding keiretsu di Jepang. Jepang, akhirnya, punya diversifikasi industri yang lebih luas (Amsden, 1989). Tiongkok memilih jalan berbeda sejak era Deng Xiaoping—pasar direformasi, investasi digelontorkan, ekspor didorong. Ekonominya tumbuh pesat, bahkan lebih cepat dari Jepang dalam beberapa dekade terakhir. Akan tetapi, Tiongkok masih bergumul dengan transparansi dan efisiensi pasar, isu yang sudah berhasil dilewati Jepang sebelumnya (Naughton, 2007).

Sektor manufaktur jadi andalan Jepang, terutama otomotif dan elektronik. Nama-nama seperti Toyota, Honda, Sony, dan Panasonic lekat dengan inovasi dan produksi kelas dunia (Cusumano, 1985). Keberhasilan mereka didukung strategi bisnis yang solid, produk dengan mutu tinggi, dan filosofi Kaizen yang mengutamakan perbaikan berkelanjutan (Imai, 1986). Namun, Jepang tak lepas dari tantangan. Populasi yang menua memperberat beban kesejahteraan sosial dan membuat jumlah tenaga kerja produktif menurun (Jones & Im, 2012). Untuk melawan tren ini, Jepang gencar mengembangkan otomasi lewat robotika dan kecerdasan buatan (Frey & Osborne, 2017), sekaligus mendorong perempuan dan imigran lebih aktif di dunia kerja (Matanle, 2011).

Pada perdagangan internasional, Jepang makin giat menjalin kerja sama lewat perjanjian seperti CPTPP dan kemitraan dengan ASEAN (Petri & Plummer, 2016). Jepang juga aktif di organisasi seperti G7 dan G20, menjaga stabilitas ekonomi global (Schwab, 2020). Setelah krisis nuklir Fukushima 2011, ketergantungan Jepang pada impor energi makin jelas. Penggunaan nuklir menurun (Kingston, 2012), jadi mereka kini all-out mengembangkan tenaga surya dan angin untuk menggantikan bahan bakar fosil (Sovacool & Valentine, 2012).

Dalam ranah kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi jadi tumpuan Jepang. Jepang membantu pembangunan, investasi, dan perdagangan di Asia Timur. Melalui *Official Development Assistance* (ODA), mereka mendampingi pembangunan ekonomi dan sosial lewat bantuan teknis dan finansial—semuanya digerakkan oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan—semua masuk radar mereka. Indonesia, misalnya, menerima dukungan besar untuk transportasi dan pengembangan SDM. JICA turun tangan dari level proyek sampai kebijakan, mulai dari infrastruktur keras dan lunak hingga pengembangan SDM. JICA juga ikut memperkuat institusi, dorong kemitraan publik-swasta (PPP), dan bersinergi dengan sektor swasta serta usaha kecil dan menengah untuk membangun wilayah. Bantuan Jepang bukan sekadar infrastruktur, tapi mengangkat kapasitas manusia dan teknologi negara penerima. Efeknya, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat, dan dampaknya berkelanjutan.

Kerja sama bilateral dan ekonomi Jepang berlandaskan nilai-nilai seperti supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Jepang telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bebas di Asia Timur, termasuk RCEP, yang melibatkan lima belas negara dan sekarang jadi perjanjian perdagangan terbesar di

dunia. Semua ini menunjukkan betapa seriusnya Jepang memajukan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi kawasan.

2.1.2. Lanskap Geopolitik Jepang Tahun 1960 an (Yoshida)

Perdana Menteri Jepang Shigeru Yoshida, yang memimpin dari 1948 hingga 1954, melahirkan apa yang sekarang dikenal sebagai Doktrin Yoshida. Kebijakan ini muncul setelah Perang Dunia II, saat Jepang mencoba berdiri kembali di tengah situasi global yang tidak menentu. Doktrin ini punya tiga inti: menjalin kerja sama erat dengan Amerika Serikat untuk menghadapi komunisme selama Perang Dingin, bergantung pada militer AS sambil tetap membatasi kekuatan pertahanan Jepang sendiri, dan mendorong diplomasi ekonomi sebagai poros utama hubungan luar negeri Jepang. Langkah-langkah inilah yang akhirnya membentuk arah kebijakan luar negeri Jepang, sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi negara itu setelah perang.

Setelah kalah dalam Perang Dunia II, Jepang tunduk di bawah Komandan Tertinggi Kekuatan Sekutu (SCAP). Mereka memerintahkan Jepang menyingkirkan militerisme dan memulai proses demokratisasi. Pada 1947, Jepang menyusun konstitusi baru, termasuk Pasal 9 yang tegas: Jepang menolak perang sebagai hak bangsa dan tidak akan pernah memelihara kekuatan militer untuk tujuan itu. Kebijakan Yoshida jelas dipengaruhi oleh batasan ini. Ia memilih untuk menjadikan aliansi dengan AS sebagai pilar keamanan nasional. Jepang menyerahkan soal keamanan ke AS, karena Pasal 9 membatasi opsi militer. Amerika Serikat beberapa kali berusaha mendorong Jepang agar menaikkan anggaran militer, tapi Yoshida tetap teguh. Konstitusi Jepang memang sengaja bersifat pasifis.

Diplomasi ekonomi menjadi salah satu kekuatan terbesar kebijakan luar negeri Jepang pada masa itu. Karena tak punya kekuatan militer yang sepadan, Jepang lebih memilih jalur ekonomi untuk menguatkan posisi global. Yoshida yakin, pemulihan ekonomi yang cepat membuka jalan bagi Jepang kembali sebagai negara kuat di dunia. Sejak era Restorasi Meiji, realisme memang sudah jadi ciri khas kebijakan luar negeri Jepang, bukan pasifisme. Strategi Yoshida memberikan ruang bagi Jepang untuk memperkuat hubungan dengan AS sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, kritik datang juga. Beberapa orang menilai, ketergantungan Jepang pada AS terlalu besar dan kebijakan itu justru membatasi peran Jepang di dunia internasional. Menariknya, istilah "Doktrin Yoshida" sendiri baru dipakai beberapa dekade setelah Yoshida mundur, dan sebagian pengamat bahkan meragukan apakah memang pantas

disebut sebagai doktrin (Koji, 2023). Tapi pada akhirnya, tetap saja doktrin inilah yang jadi fondasi bagi kebijakan luar negeri dan pembangunan ekonomi Jepang pasca perang. Menekankan pembangunan domestik dan aliansi keamanan dengan AS, Jepang berhasil membangun diri lagi sebagai kekuatan ekonomi dunia.

Lalu, ada Perjanjian Keamanan AS-Jepang tahun 1960—atau *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan*. Inilah tonggak penting hubungan dua negara. Perjanjian ini mengukuhkan aliansi strategis Jepang dan AS, dan selama beberapa dekade, menentukan arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Jepang. Setelah AS menduduki Jepang sampai 1952, Jepang menetapkan konstitusi damai dengan Pasal 9 yang melarang mereka membangun kekuatan militer untuk perang. Pada 1951, Jepang dan AS sudah menandatangani Perjanjian Keamanan, memberi Amerika hak menempatkan pasukan di Jepang demi menjaga keamanan Asia-Pasifik. Perjanjian itu diubah dan dipererat lagi pada 1960, memantapkan hak AS untuk mempertahankan basis militernya di Jepang serta menggarisbawahi komitmen kedua negara untuk saling melindungi jika terjadi serangan bersenjata. Namun, AS juga berkewajiban berkonsultasi dengan Jepang soal keputusan besar terkait keamanan.

Akibatnya, posisi geopolitik Jepang sangat dipengaruhi perjanjian ini. Jepang sangat bergantung pada "payung" keamanan AS, jadi hampir seluruh pertahanan negara mereka ada di tangan AS—faktanya, sekitar 47 ribu personel militer Amerika masih bermarkas di berbagai pangkalan Jepang sampai sekarang. Hal ini memang membuat Jepang terlindungi dari ancaman luar, tapi sebaliknya membatasi ruang geraknya dalam menentukan kebijakan pertahanan. Pada akhirnya, banyak pilihan keamanan Jepang ditentukan oleh strategi AS di Asia-Pasifik.

Bukan hanya soal keamanan, Jepang juga memilih jalur yang berbeda saat membangun negara. Alih-alih mendorong ekspansi militer, mereka menaruh fokus besar pada pembangunan ekonomi. Konstitusi pasifis yang diadopsi setelah Perang Dunia II memberi ruang bagi Jepang mengalihkan dana yang biasanya habis untuk militer—dipakai untuk menggenjot ekonomi. Hasilnya luar biasa: Jepang melesat jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia di tahun 1960-an dan 1970-an, yang orang kenal sebagai “Keajaiban Ekonomi Asia.” Tapi, strategi ini punya konsekuensi. Ada kekhawatiran soal daya tahan nasional Jepang kalau sewaktu-waktu harus menghadapi ancaman tanpa bantuan dari luar.

Dalam arena geopolitik kawasan, posisi Jepang penting. Mereka menjadi salah satu pengimbang utama kekuatan di Asia Timur. Bersama AS, Jepang ikut mendorong

strategi keamanan regional untuk menahan pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok selama Perang Dingin. Keberadaan pangkalan militer AS memang membantu jaga stabilitas, tapi urusan ini juga rawan gesekan dengan beberapa negara tetangga yang merasa terancam oleh aliansi tersebut. Di dalam negeri sendiri, kehadiran pangkalan militer AS penuh kontroversi. Insiden yang melibatkan personel militer AS—mulai dari kejahatan sampai kecelakaan—sering memicu demo dan gerakan anti-pangkalan. Kontroversi ini memperlihatkan tarik-ulur antara kepentingan strategis menjaga kemitraan dengan AS dan tuntutan masyarakat yang ingin Jepang berdikari tanpa terlalu menggantungkan diri pada kekuatan asing (Mardiliana, 2013).

Seiring peta keamanan dunia bergeser, Jepang mulai mengevaluasi ulang kebijakan pertahanannya. Ancaman dari Korea Utara dan semakin tajamnya kekuatan militer Tiongkok mendesak Jepang memperkuat militernya. Walau masih terikat konstitusi pasifis, Jepang kini tampil lebih aktif dalam operasi keamanan regional dan global—ikut dalam misi penjaga perdamaian, sampai latihan militer gabungan dengan sekutu. Perubahan kebijakan ini jadi cerminan usaha Jepang menyesuaikan diri dengan dinamika keamanan baru, sambil tetap berjuang menjaga keseimbangan antara tradisi pasifisme dan kebutuhan melindungi kepentingan nasional (Alfonz dan Akmal, 2023).

Tak berhenti di situ, sebagai kekuatan ekonomi dunia, Jepang memanfaatkan posisinya buat mendorong stabilitas dan kerja sama se-Asia Timur. Mereka aktif dalam organisasi regional dan diplomasi ekonomi, berusaha membentuk arah politik dan ekonomi kawasan. Partisipasi Jepang di berbagai forum itu jelas memperlihatkan komitmennya pada kemakmuran dan stabilitas wilayah.

Jepang aktif membangun kerja sama regional lewat berbagai forum, termasuk *ASEAN Plus Three* (APT) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC). Melalui APT, yang melibatkan negara ASEAN, Tiongkok, dan Korea Selatan, Jepang benar-benar ambil bagian dalam urusan integrasi ekonomi dan politik kawasan. Salah satu langkah besarnya ada di sektor keuangan, misal lewat *Chiang Mai Initiative* (CMI), yang jadi mekanisme bantuan likuiditas buat negara anggota. Jepang jadi motor utama di balik pengembangan dan perluasan CMI, termasuk perubahan skema swap bilateral ke sistem multilateral waktu rapat ke-10 Menteri Keuangan ASEAN+3 di Kyoto, Mei 2007. Setelah itu, Jepang juga mendorong perluasan dana CMI, dari awalnya $78 miliar, naik ke $120 miliar di Februari 2009, lalu bertambah ke $240 miliar di pertemuan ke-15 di Manila, Mei 2012. Pada skema ini, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan sama-

sama jadi penyumbang terbesar, masing-masing menanggung 32%. Jika dijumlah, tiga negara ini menutupi 80% dari total dana, sisanya 20% dari anggota ASEAN.

Selain APT, Jepang juga turut berpartisipasi di APEC, forum ekonomi yang tujuannya memangkas hambatan dagang dan memperkuat integrasi ekonomi Asia-Pasifik. Sebagai pendiri APEC, Jepang konsisten mendorong perdagangan dan investasi bebas di kawasan ini. Mereka pun sudah sering jadi tuan rumah pertemuan APEC serta aktif dalam proyek-proyek strategis demi tujuan utama APEC: memperkuat sinergi ekonomi dan menciptakan iklim dagang yang terbuka dan inklusif. Hampir tiga perempat perdagangan Jepang terjadi dengan anggota APEC (74% ekspor, 69% impor pada 2001). Artinya, APEC ini vital buat ekonomi Jepang. Selain itu, pada tahun yang sama, 41,34% investasi langsung Jepang mengalir ke kawasan APEC, dan sekitar 68,4% warga Jepang yang tinggal di luar negeri tersebar di situ juga (MoFA Japan, 2023).

Tentu, posisi Jepang sebagai pemimpin regional tak lepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah rivalitas dengan Tiongkok. Dua negara besar Asia Timur ini bersaing ketat berebut pengaruh dan bentuk struktur politik-ekonomi kawasan. Jepang dan Tiongkok getol hadir di banyak forum regional, seperti APT, *Six Party Talks* (6PT), dan *ASEAN Regional Forum* (ARF). Keduanya jelas berusaha membentuk kebijakan dan arah integrasi di institusi-institusi ini, khususnya lewat APT di mana mereka mendorong kerja sama ekonomi dan politik Asia Timur.

Lalu, untuk memperkuat pengaruh, Tiongkok meluncurkan proyek infrastruktur dan investasi raksasa lewat *Belt and Road Initiative* (BRI) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Jepang lalu menyeimbangkan langkah itu dengan membangun *Asia-Africa Growth Corridor* (AAGC) bersama India pada 2017. Proyek itu menghubungkan Asia-Afrika lewat jalur laut dan mendorong sinergi ekonomi. Tujuannya jelas, yakni mengimbang dominasi Tiongkok di kawasan tersebut. Di sisi lain, rivalitas Jepang-Tiongkok juga berimbas ke urusan keamanan dan ekonomi regional (Reyhandhika, n.d). Untuk menjaga posisi, kedua negara membangun aliansi dan memperkuat kerja sama militer dengan negara-negara Asia Tenggara. Lihat saja respons Jepang terhadap aktivitas militer Tiongkok yang makin agresif di Laut Cina Selatan. Jepang mempererat kerja sama pertahanan dengan Indonesia dan Malaysia (Yamaguchi, 2025).

Pada 1972, Jepang dan Tiongkok akhirnya mempererat kembali hubungan diplomatik mereka. Setelah bertahun-tahun ketegangan sejak Perang Dunia II, langkah

ini benar-benar mengubah peta politik dan ekonomi Asia Timur. Begitu kesepakatan resmi terjalin, situasinya segera berbeda—stabilitas kawasan meningkat. Kontak langsung antara kedua negara mengurangi risiko konflik. Mereka mulai membuka ruang untuk dialog dan kerja sama, sesuatu yang sebelumnya hampir tidak mungkin terwujud. Hubungan Jepang dan Tiongkok saat itu juga membawa dampak pada AS dan Uni Soviet. Jepang masih teguh di bawah payung AS, sementara Tiongkok mulai membuka diri—itu menciptakan pola keseimbangan baru di Asia Timur selama Perang Dingin. Dampaknya terasa sampai ke ASEAN. Normalisasi ini mendorong Jepang dan Tiongkok lebih aktif dalam organisasi, memacu kerja sama multilateral, sekaligus memperkuat stabilitas suara negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara lain mulai mempertimbangkan ulang arah politik luar negeri mereka terhadap Tiongkok. Banyak yang akhirnya mempercepat proses normalisasi diplomatik di seluruh Asia (Widodo, 2022).

2.2. Stagnansi pasca pertumbuhan dan kebijakan Abenomic

2.2.1. Stagnansi

Stagnasi ekonomi Jepang mulai terasa setelah ledakan *asset bubble* tahun 1991—masyarakat mengenalnya sebagai *Heisei Bubble Collapse*. Posen (1998) mengkaji bahwa biang masalahnya ini gabungan antara spekulasi liar di properti dan saham, kebijakan moneter yang terlalu longgar di akhir 1980-an, ditambah lagi pemerintah dan BoJ gagal menaikkan suku bunga tepat waktu. Begitu gelembung pecah, harga tanah dan saham anjlok sampai lebih dari 60% dalam beberapa tahun. Banyak perusahaan dan bank ambruk—efeknya domino, ekonomi Jepang limbung.

Sebelum semuanya berantakan, ekonomi Jepang tumbuh rata-rata 4–5% per tahun di era 1980-an. Begitu masuk dekade 1990-an hingga 2000-an, angka itu merosot, bahkan tak sampai 1%. Hayashi & Prescott (2002) menjuluki fase ini "The Lost Decade"—masa suram dengan produktivitas yang mandek, deflasi, dan permintaan domestik yang lemah. Bank-bank Jepang tenggelam dalam kredit macet, dan ketika pemerintah coba memberi stimulus fiskal, hasilnya tidak banyak membantu. Defisit fiskal malah makin membengkak tanpa membawa pemulihan yang berarti.

Bukan hanya faktor keuangan, masalah demografis bikin keadaan makin rumit. Bloom, Canning & Fink (2010) mencatat populasi menua dengan cepat. Ini menggerus tenaga kerja produktif dan mempersempit konsumsi dalam negeri. Bayangkan, rasio

penduduk usia 65 tahun ke atas melonjak dari 12% di 1990 ke lebih dari 23% pada 2010. Permintaan lesu, beban sosial menanjak.

BoJ coba merespons lewat kebijakan suku bunga nol dan akhirnya Quantitative Easing (QE) di awal 2000-an. Akan tetapi, dampaknya terbatas, Ito & Mishkin (2006) menunjukkan bahwa walaupun QE bikin biaya pinjaman lebih murah, bank dan perusahaan tetap segan berinvestasi karena ekspektasi deflasi terus membayangi.

2.2.2. Kebijakan Abenomics

Abenomics muncul di bawah kepemimpinan Shinzo Abe pada Desember 2012, ketika Jepang sudah dua dekade terjebak dalam stagnasi ekonomi. Abe menaruh harapan besar pada pendekatan "tiga panah"—pelonggaran moneter yang agresif, stimulus fiskal besar-besaran, dan reformasi struktural jangka panjang. Hausman & Wieland (2014) menganalisis bahwa Abenomics ingin membawa perubahan besar. Di bawah kebijakan ini, moneter dan fiskal berjalan seirama buat mendorong ekspektasi inflasi dan pertumbuhan nyata. Bank of Japan, dengan Gubernur Haruhiko Kuroda, meluncurkan Quantitative and Qualitative Easing (QQE) di 2013. Dalam dua tahun, mereka melipatgandakan basis moneter. Yen pun melemah, ekspor Jepang jadi sanggup bersaing lagi di pasar dunia.

Efeknya terasa begitu cepat, Studi Miake (2015) mencatat, antara 2013–2015 inflasi sempat merangkak naik mendekati 2%, target pemerintah, sementara pertumbuhan PDB riil mencapai 1,4% per tahun. Itu pencapaian terbaik sejak krisis 2008. Tapi perjalanan tak selamanya mulus. Harga minyak anjlok dan permintaan global melemah, inflasi pun turun lagi setelah 2016. Panah kedua, stimulus fiskal, fokus pada pembangunan infrastruktur, rekonstruksi pascabencana, dan berbagai insentif konsumsi rumah tangga. Hori & Saito (2017) mencatat, langkah ini dorong permintaan domestik, tapi konsekuensinya utang publik Jepang ikut melonjak. Tahun 2020, nilainya menembus 230% dari PDB—tertinggi di kelompok negara maju. Panah ketiga yang paling menantang dan penuh kontroversi: reformasi struktural. Pemerintah mencoba menderegulasi pasar tenaga kerja, mendorong lebih banyak perempuan masuk ke dunia kerja (*Womenomics*), serta membuka sektor agrikultur dan energi. Lipscy (2018) menilai ada kemajuan: efisiensi sektor swasta naik, produktivitas tumbuh. Tapi hasilnya datang pelan—dan belum cukup kuat menembus deflasi struktural yang membludak.

2.2.3. Kritik

Abenomics pernah membuat orang Jepang berharap banyak. Awal 2010-an, kepercayaan terhadap ekonomi Jepang balik lagi. Tetapi, banyak ekonom sekarang mengatakan, keberhasilan itu setengah-setengah dan tidak bertahan lama. Satu masalah besar—pembagian manfaatnya nggak adil. Inoue dan Blomström (2017) menunjukkan laba korporasi tumbuh pesat di era Abenomics, namun kesejahteraan rumah tangga lebih-lebih lagi jalan di tempat. Perusahaan besar, bahkan eksportir yang diuntungkan pelemahan yen, memang panen untung. Sementara buat para pekerja, nyaris tidak ada perbaikan—upah riil stagnan demikian.

Sekine (2019) juga nemuin hal serupa, yakni pengangguran menurun sampai di bawah 3 persen, angka yang kelihatan impresif. Namun, gaji nominal hanya naik tipis, sekitar 0,5 persen setahun. Salah satu biang keladinya, proporsi pekerja non-reguler makin menggembung, sekarang hampir menyentuh 40 persen dari total tenaga kerja. Situasi ini bikin ketimpangan tambah lebar, konsumsi dalam negeri melemah, akhirnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga terbentur.

Kritik lain diarahkan ke BoJ dan kebijakan moneternya yang berlebihan. Posen (2018) bilang, program pelonggaran kuantitatif (QQE) membuat harga aset keuangan naik, sedangkan perusahaan sibuk *buyback* saham sendiri, tidak lain investasi produktif. Basis moneter memang meroket lebih dari 100% antara 2013–2019, akan tetapi inflasi tetap terbendung di level 0–1%, jauh dari target 2%.

Masalah reformasi struktural—panah ketiga Abenomics—juga kembali dengan hasilnya yang mengecewakan. Schaede (2020) meneliti usaha seperti Womenomics dan deregulasi pasar tenaga kerja benar dilakukan, tapi belum maksimal untuk mengubah struktur yang kaku di sektor pertanian, energi, dan ketenagakerjaan. Akhirnya, produktivitas tetap mandek dan populasi menua terus, bikin basis ekonomi domestik Jepang makin sempit.

2.3. Strategis Gagasan Abenomics

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memulai program kebijakan ekonomi yang disebut Abenomics setelah beliau kembali menjabat pada tahun 2012. Tujuan utama dari Abenomics adalah untuk menghidupkan kembali ekonomi Jepang, yang telah mengalami stagnasi dan deflasi selama lebih dari dua puluh tahun. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kebijakan ini terdiri dari tiga "panah" utama: pelonggaran moneter yang agresif, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Setelah gelembung ekonomi Jepang runtuh pada awal 1990-an, negara itu memasuki apa yang disebut sebagai "Dekade yang Hilang", yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan deflasi yang terus-menerus. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk memperbaiki ekonomi, hasilnya masih sangat sedikit. Abenomics, rencana jangka panjang untuk mengatasi masalah ekonomi Jepang, diluncurkan oleh Shinzo Abe, yang kembali menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 2012. Salah satu elemen utama dari Abenomics adalah kebijakan moneter yang longgar, yang diterapkan oleh Bank of Japan (BOJ) melalui pelonggaran kuantitatif, juga dikenal sebagai QE. Mengatasi deflasi dan meningkatkan inflasi ke tingkat yang lebih sehat, sekitar 2% per tahun, adalah tujuan utama dari kebijakan ini. BOJ mengumumkan program QE yang ambisius pada 4 April 2013, dengan janji untuk membeli obligasi pemerintah senilai ¥60 hingga ¥70 triliun setiap tahun dalam upaya untuk menggandakan basis moneter dan mencapai target inflasi 2% dalam waktu dua tahun. Pada 31 Oktober 2014, BOJ memperluas program ini dengan meningkatkan pembelian obligasi menjadi ¥80 triliun setiap tahun. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian, bank sentral, dalam hal ini BOJ, membeli aset keuangan dalam jumlah besar. Dengan membeli obligasi pemerintah dan aset lainnya, BOJ memasukkan likuiditas ke dalam sistem perbankan dan berharap dapat menurunkan suku bunga jangka panjang, mendorong pinjaman dan investasi, dan meningkatkan inflasi. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan ini diusulkan, antara lain, Pertama, Kebijakan pelonggaran kuantitatif (QE) yang diterapkan di Jepang memiliki berbagai dampak terhadap ekonomi negara tersebut. Salah satu tujuan utama QE adalah mencapai target inflasi sebesar 2%. Pada awal implementasinya, inflasi sempat meningkat dan mencapai sekitar 1,5% pada tahun 2014. Namun, tren ini tidak berkelanjutan, dan inflasi kembali melemah dalam tahun-tahun berikutnya, sehingga target 2% belum tercapai secara konsisten. Kedua, Dari sisi pertumbuhan ekonomi, QE awalnya memberikan dorongan bagi perekonomian Jepang. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya terbatas karena pertumbuhan PDB tetap moderat. Jepang masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan, seperti penuaan populasi dan stagnasi produktivitas, yang

menghambat efek QE secara lebih luas. Ketiga, Di pasar valuta asing, kebijakan pelonggaran moneter yang agresif menyebabkan depresiasi yen. Awalnya, depresiasi ini memberikan keuntungan bagi sektor ekspor Jepang dengan meningkatkan daya saing produk-produk Jepang di pasar global. Namun, seiring waktu, manfaat tersebut berkurang karena adanya faktor eksternal seperti perubahan permintaan global dan dinamika perdagangan internasional. Dan yang terakhir, Selain itu, pasar saham Jepang mengalami peningkatan signifikan sebagai dampak dari kebijakan QE. Indeks Nikkei mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade, mencerminkan lonjakan harga saham yang dipicu oleh peningkatan likuiditas di pasar. Namun, ada kekhawatiran bahwa kenaikan ini lebih disebabkan oleh efek likuiditas dari QE dibandingkan dengan penguatan fundamental ekonomi yang sesungguhnya (Fukuda, 2015).

Meskipun QE dirancang untuk menopang ekonomi, beberapa ekonom mengkritik terkait kebijakan ini, seperti QE memiliki efektivitas terbatas dalam mengatasi deflasi yang sudah mengakar dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tanpa reformasi struktural yang signifikan, bergantung terlalu banyak pada QE dapat menyebabkan ketergantungan pada kebijakan moneter tanpa mengatasi masalah ekonomi yang mendasar, dan BOJ dapat mengubah pasar keuangan dan menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan dalam jangka panjang dengan membeli aset dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, Bagian dari Abenomics, pelonggaran kuantitatif yang dilakukan Bank of Japan adalah upaya berani untuk mengatasi deflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada beberapa kemajuan awal, reformasi kebijakan fiskal dan struktural yang signifikan diperlukan untuk mendukung tujuan Abenomics dan memastikan pertumbuhan ekonomi Jepang di masa depan. Tantangan struktural dan keterbatasan kebijakan moneter menunjukkan bahwa QE saja tidak cukup untuk mencapai pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Di bawah Abenomics, stimulus fiskal dimaksudkan untuk meningkatkan belanja pemerintah dan meningkatkan permintaan agregat. Pada awal masa jabatannya, Abe mengumumkan paket stimulus fiskal sebesar ¥10,3 triliun, atau sekitar 2% dari PDB Jepang pada saat itu. Paket ini berkonsentrasi pada investasi dalam infrastruktur, dukungan bagi usaha kecil dan menengah, dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri. Pada awal mulainya diimplementasikannya stimulus fiskal tentu saja memiliki dampak positif, seperti Dalam jangka pendek, ekonomi Jepang tumbuh sebesar 1,4% pada tahun 2013, naik dari pertumbuhan 1,2% pada tahun 2012. Ini adalah hasil dari paket stimulus. Selain itu,

Tingkat pengangguran turun dari 4,3% pada tahun 2012 menjadi 3,6% pada tahun 2014 berkat investasi pemerintah dalam proyek infrastruktur dan dukungan sektor swasta. Selanjutnya, kebijakan moneter yang longgar dan stimulus fiskal meningkatkan kepercayaan bisnis dan konsumen. Ini terlihat dalam peningkatan indeks sentimen bisnis Tankan dan indeks kepercayaan konsumen.

Meskipun kebijakan ini memberikan manfaat dalam jangka pendek tetapi tidak luput dari tantangan dan kritik, salah satunya adalah peningkatan utang publik. Sebelum Abenomics, tingkat utang publik Jepang sudah tinggi, dan dengan peningkatan belanja pemerintah, rasio utang terhadap PDB meningkat lebih dari 200%. Kemudian, ada kekhawatiran bahwa stimulus fiskal yang berkelanjutan dapat meningkatkan belanja pemerintah tanpa mendorong pertumbuhan sektor swasta. Terakhir, menurut beberapa ekonom, stimulus fiskal hanya akan memberikan dorongan sementara, tetapi tidak akan mengatasi masalah ekonomi Jepang secara menyeluruh.

Selain itu, adapun peningkatan pajak konsumsi adalah salah satu elemen kebijakan fiskal Abenomics yang paling kontroversial. Dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dan mengendalikan utang publik, pemerintah menaikkan pajak konsumsi dari 5% menjadi 8% pada April 2014. Namun, ada kekhawatiran tentang dampak langkah ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan konsumsi domestik (K. Hausman and F. Wieland, 2015). Seperti pada penurunan konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga menurun setelah kenaikan pajak, yang berkontribusi pada kontraksi ekonomi sebesar 1,6% pada kuartal kedua tahun 2014. Kemudian peningkatan pendapatan pemerintah, yakni Pendapatan pemerintah dari pajak konsumsi meningkat, membantu mengurangi defisit anggaran meskipun konsumsi menurun. Dan yang terakhir, Karena kenaikan pajak, ada perdebatan tentang kapan dan seberapa besar kenaikan tersebut. Beberapa orang menganggap kenaikan tersebut terlalu dini dan dapat menghambat pemulihan ekonomi.

Secara keseluruhan, program stimulus fiskal Abenomics mendorong perekonomian Jepang, meningkatkan pertumbuhan dan menurunkan pengangguran dalam jangka pendek. Namun, masalah seperti peningkatan utang publik dan ketergantungan pada belanja pemerintah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan reformasi struktural yang lebih dalam.

Selain kebijakan moneter dan stimulus fiskal, adapun dalam upaya Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menghidupkan kembali perekonomian Jepang, kebijakan ketiga yang dikenal sebagai Abenomics adalah reformasi struktural. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui liberalisasi perdagangan, reformasi pasar tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, dan promosi budaya. Partisipasi Jepang dalam negosiasi Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) adalah salah satu langkah penting dalam reformasi struktural Abenomics. Dengan bergabung dalam TPP, Jepang berusaha untuk membuka pasar domestiknya dan meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Selain itu, tujuan dari langkah ini adalah untuk mendorong reformasi internal, khususnya di bidang yang sebelumnya telah dilindungi, seperti pertanian. Sebuah penelitian menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan melalui TPP dianggap sebagai cara efektif untuk mendorong agenda reformasi struktural Abenomics, mengatasi resistensi domestik terhadap transformasi. Untuk meningkatkan produktivitas, reformasi pasar tenaga kerja sangat penting. Pemerintah Jepang mengadopsi gagasan "Womenomics" untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di dunia kerja. Langkah-langkah yang diambil termasuk mendorong kemajuan karier perempuan dan membuat lingkungan kerja yang kondusif bagi perempuan, baik saat mengasuh anak maupun tidak. Diharapkan inisiatif ini dapat memenuhi prinsip kesetaraan gender dengan mengubah struktur posisi dan perspektif yang menghilangkan perempuan di dunia kerja. Selanjutnya, demi meningkatkan efisiensi dan daya saing, sektor pertanian Jepang menjadi target reformasi. Dengan membuka sektor ini terhadap persaingan internasional melalui TPP, pemerintah berharap dapat mendorong petani Jepang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani Jepang pada subsidi pemerintah dan mendorong inovasi dalam sektor pertanian. Sebagai bagian dari reformasi struktural, Jepang juga meluncurkan strategi "Cool Japan" untuk mempromosikan budaya dan produk kreatifnya di pasar global. Tujuannya adalah untuk memperluas skala industri kreatif hingga lebih dari 50 triliun yen dan meningkatkan persepsi positif Jepang di dunia pada tahun 2033. Dalam rencana ini, perubahan ke arah digital, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan realitas virtual (VR), dan penekanan pada warisan budaya dan praktik tradisional Jepang akan diperkenalkan.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan, melakukan reformasi struktural masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah penolakan kelompok kepentingan domestik yang dekat dengan partai politik yang berkuasa, seperti organisasi petani, terhadap liberalisasi sektor pertanian. Selain itu, ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja, tetapi masih ada hambatan struktural dan budaya. Selain itu, kurangnya siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act) yang menyeluruh dan kolaborasi antar sektor menghambat kinerja reformasi. Selama Abenomics, reformasi struktural telah dilakukan. Beberapa hasil positif termasuk peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan promosi budaya Jepang di tingkat global. Namun, masih ada perdebatan tentang seberapa efektif reformasi ini secara keseluruhan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Menurut beberapa penelitian, meskipun indikator tertentu meningkat, masalah struktural dan budaya yang serius memerlukan reformasi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Beberapa indikator ekonomi Jepang telah mengalami peningkatan yang positif sejak Abenomics dimulai. PDB riil Jepang tumbuh sebesar 1,4% pada tahun 2013, naik dari kontraksi 0,5% pada tahun 2012. Tingkat pengangguran turun dari 4,3% pada tahun 2012 menjadi 3,6% pada tahun 2014. Selain itu, indeks harga konsumen (CPI), yang sebelumnya mengalami deflasi, mulai menunjukkan sinyal inflasi, mencapai 1,6% pada tahun 2014. Namun, pertumbuhan ekonomi Jepang tidak sepenuhnya stabil meskipun ada perbaikan awal. Pemerintah mencoba mengurangi defisit fiskal pada tahun 2014 dengan menaikkan pajak konsumsi dari 5% menjadi 8%. Ini menyebabkan kontraksi PDB sebesar 0,1% pada tahun 2014 dan 0,5% pada tahun 2015, menunjukkan sensitivitas ekonomi terhadap kebijakan fiskal (Merler, 2018).

Terdapat harapan bahwa peningkatan likuiditas dan stimulus fiskal yang diberikan oleh Abenomics akan mendorong perusahaan untuk menaikkan upah pekerja mereka. Namun, data menunjukkan bahwa upah riil tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan turun pada tahun 2013. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang seberapa efektif Abenomics dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Selama lebih dari dua puluh tahun, defisit telah menjadi masalah abadi di Jepang. Meskipun ada indikasi peningkatan harga, Abenomics bertujuan untuk mencapai target inflasi 2% dengan meningkatkan basis moneter dan meningkatkan ekspektasi inflasi. Namun, mencapai target ini masih sulit. Peningkatan upah adalah salah satu cara penting untuk keluar dari deflasi karena peningkatan upah meningkatkan daya beli konsumen. Permintaan meningkat dan harga naik. Namun, karena ketidakpastian ekonomi

global dan domestik, perusahaan Jepang cenderung berhati-hati dalam menaikkan upah. Selain itu, proporsi pekerja non-reguler di pasar tenaga kerja Jepang membatasi kenaikan upah.

Selain itu, gagasan Abenomics juga menimbulkan dampak ketimpangan sosial yang mungkin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti dalam hal menopang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi adalah tujuan utama Abenomics. Meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa manfaatnya tidak merata di seluruh masyarakat. Karena kebijakan moneter yang longgar cenderung meningkatkan harga aset, orang-orang yang memiliki banyak aset menjadi lebih kaya. Akibatnya, perbedaan antara kaya dan miskin semakin diperlebar. Selain itu, banyak pekerjaan baru yang muncul adalah pekerjaan non-reguler dengan upah dan keamanan kerja yang lebih rendah, meskipun tingkat pengangguran menurun. Ini dapat membuat pekerja lebih tidak stabil secara finansial. Pemerintah Jepang memperkenalkan "Womenomics" sebagai bagian dari Abenomics untuk mengatasi ketidaksamaan gender di angkatan kerja. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akses perempuan ke posisi kepemimpinan dan mengubah tempat kerja menjadi lebih ramah perempuan. Meskipun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah meningkat, tantangan masih ada. Banyak perempuan yang memasuki angkatan kerja menempati posisi non-reguler, yang memiliki peluang lebih sedikit untuk maju dan gaji lebih rendah.

Selain itu, norma budaya yang tidak seimbang dan tanggung jawab domestik yang tidak seimbang terus menghalangi perempuan untuk maju di tempat kerja. Dan yang terakhir, Mengatasi ketimpangan regional juga merupakan masalah bagi Abenomics. Daerah pedesaan dan regional lainnya tidak merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi yang sama. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi di kota-kota seperti Tokyo. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan migrasi penduduk dari daerah ke kota, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan regional dan masalah sosial lainnya.

2.4. Strategis Gagasan New Capitalism

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida memperkenalkan gagasan "New Capitalism" pada tahun 2021 untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial negara itu. Dengan menekankan pentingnya pembagian kekayaan dan penerapan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam praktik bisnis, konsep ini bertujuan untuk menciptakan siklus pertumbuhan dan distribusi yang berkelanjutan. Metode ini menunjukkan pergeseran dari kebijakan ekonomi sebelumnya, seperti Abenomics, dengan fokus yang lebih kuat pada kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan. Kishida berpendapat bahwa model kapitalisme tradisional telah menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi juga telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dalam pidatonya di London pada Mei 2022, Kishida menekankan bahwa tujuan dari New Capitalism adalah untuk menciptakan siklus pertumbuhan dan distribusi yang berkelanjutan dan membangun masyarakat baru setelah pandemi COVID-19. Upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan merupakan pilar utama dari New Capitalism. Kishida menekankan bahwa upah harus ditingkatkan bagi tenaga kerja di industri penting seperti perawatan kesehatan, perawatan anak, dan perawatan lansia. Kishida juga mendorong tenaga kerja di perusahaan subkontraktor, yang seringkali menerima upah lebih rendah daripada tenaga kerja perusahaan utama. Selain itu, New Capitalism juga menekankan pentingnya praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini mencakup promosi teknologi hijau, digitalisasi, dan investasi dalam modal manusia. Kishida mengajak investor untuk berinvestasi dalam Jepang dengan menekankan bahwa pemerintah berupaya mengubah isu-isu sosial menjadi mesin pertumbuhan, bekerja sama erat dengan sektor swasta.

Sementara Abenomics, yang didirikan oleh pendahulu Kishida, Shinzo Abe, mengutamakan pertumbuhan ekonomi melalui pelonggaran moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural, New Capitalism menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang lebih adil. Kishida percaya bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan distribusi yang merata untuk menciptakan siklus yang berkelanjutan. Selain itu, New Capitalism menekankan peningkatan investasi dalam kesejahteraan sosial, yang mencakup peningkatan upah bagi pekerja di sektor-sektor penting dan investasi dalam modal manusia untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat.

Ada berbagai tanggapan dari masyarakat dan dunia usaha terhadap ide kapitalisme baru. Fokusnya pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan distribusi kekayaan mendapatkan pujian dari beberapa orang, sementara yang lain khawatir tentang implementasinya dan bagaimana hal itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Misalnya, meskipun Kishida telah mencapai kesuksesan di tingkat internasional, masalah ekonomi nasional dan skandal politik partainya telah mengurangi popularitasnya di dalam negeri (Kushida, 2024). Kemudian, perusahaan menghadapi tekanan institusional dari pemerintah konsumen, dan masyarakat untuk membuat rantai pasok lebih tangguh dengan mendiversifikasi pemasok dan menyimpan inventaris lebih banyak–yang secara tidak langsung mempercepat fragmentasi GVC.

Fragmentasi itu sendiri menyebabkan efisiensi menurun, biaya logistik meningkat, dan waktu produksi menjadi lebih lama. Negara-negara ingin mengamankan suplai penting seperti semikonduktor atau bahan baku kritis dengan memilih pesaing alternatif atau membawa kembali sebagian produksi ke dalam negeri atau ke negara-negara yang dianggap mitra. Seiring dengan fragmentasi *supply chain*, perdagangan dan teknologi menjadi arena politik yang sangat aktif. Kebijakan pertahanan, keamanan nasional, dan ideologi berperan besar dalam keputusan ekonomi. Misalnya, pembatasan ekspor chip dan kontrol atas teknologi tinggi bukan hanya soal ekonomi, tetapi dianggap sebagai bagian dari strategi keamanan nasional AS terhadap Tiongkok.

Menurut Bai, Fernández-Villaverde, Li, dan Zanetti (2024) menyebutkan bahwa gangguan pasokan global memperjelas bahwa keputusan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, dampak regulasi, dan intervensi yang dipicu oleh kepentingan politis.

Kebijakan seperti embargo teknologi, kontrol ekspor, *blacklist* perusahaan, seperti Huawei, SMIC, serta kondisi-kondisi keamanan baru yang mempengaruhi siapa yang boleh ikut dalam proyek infrastruktur digital atau jaringan 5G, semuanya memperlihatkan bahwa teknologi dan perdagangan telah menjadi instrumen geopolitik. Perusahaan harus memperhatikan regulasi lintas negara, risiko reputasi dan keamanan data, dan keputusan pemerintah asing yang dapat mengubah kondisi bisnis dengan cepat.

2.5. Persaingan ekonomi Tiongkok dengan AS: Perang Dagang

Salah satu konsep utama dalam ekonomi politik internasional adalah persaingan ekonomi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sejak abad ke-21, pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta ekspansi perdagangannya, telah menentang dominasi AS dan meningkatkan persaingan di sektor perdagangan, teknologi, dan manufaktur. Defisit perdagangan yang signifikan dengan Tiongkok menjadi pendorong utama ketegangan antara kedua negara sebagai pemerintah AS mengecam praktik perdagangan Tiongkok yang menghasilkan ketidakseimbangan dan memperkenalkan kebijakan protektif (Xu, 2024).

Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat intensif pada tahun 2018 dimana pemerintahan Trump memperkenalkan tarif ke Tiongkok sebagai bagian dari strategi "*America First*" yang bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan. Tiongkok melakukan tarif balasan yang menyebabkan perang dagang. Antara tahun 2018-2019, AS melakukan tarif sekitar 350 miliar dolar AS dari produk Tiongkok, sementara Tiongkok menanggapi sekitar lebih dari 100 miliar dolar AS dari produk AS (Mobaraka, 2023).

Perang dagang antara Tiongkok dan AS terwujud dalam kebijakan tarif impor, di mana AS menaikkan tarif terhadap produk Tiongkok agar barang domestik lebih bersaing. Sebagai implikasi kebijakan tersebut, Tiongkok membalas balik dengan tarif produk Amerika Serikat, termasuk di sektor pertanian dan manufaktur, yang mengakibatkan ketegangan perdagangan semakin meningkat dan volume perdagangan bilateral semakin menurun (Rifa'i, 2026).

Perang dagang antara Tiongkok dan AS bukan hanya soal dua negara adu kepentingan. Dampaknya terasa secara meluas, hingga mengguncang ekonomi dunia. Ketegangan ini membuat rantai pasok global yang tadinya rapat dan efisien menjadi tidak teratur. Tarif naik, kebijakan perdagangan berubah-ubah, akhirnya perusahaan multinasional harus berputar otak untuk mengambil langkah strategis. Banyak yang memindahkan sebagian produksinya ke negara lain, mencari celah supaya tidak terkena tarif mahal. Di sisi lain, konflik ini membuat kepercayaan bisnis turun dan investasi global jadi terhambat.

Selain urusan ekonomi, perang dagang antara China dan Amerika Serikat juga masuk akal jika kita lihat sebagai bagian dari persaingan geopolitik yang lebih luas di tingkat global. Melalui konflik perdagangan ini, kedua negara besar tersebut berupaya mempertahankan, bahkan memperluas, pengaruh mereka di tengah ekonomi dunia yang terus berkembang.

Dalam konteks ini, kebijakan perdagangan bukan sekadar soal ekspor-impor. Negara-negara tersebut memanfaatkannya sebagai alat *geoeconomics*—mereka menggunakan kekuatan ekonomi untuk tujuan strategis dan politik dalam hubungan internasional. Persaingan pun tidak hanya terbatas pada perdagangan barang. Sektor teknologi tinggi, rantai pasok yang penting, dan dominasi industri masa depan dapat menjadi sarana persaingan kekuatan antara Tiongkok dan AS.